PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SIDOSARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nurmayani

ABSTRAK

Pengaturan tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, Substansi penetapan Rancangan APBDesa menyisakan beberapa hal yang masih perlu dibenahi, yaitu: 1) Tidak dijelaskannya hasil evaluasi Bupati/Walikota yang menyetujui Rancangan APBDesa. Sehingga yang terkesan didalam substansi Pasal 7 tersebut adalah Kepala Desa hanya bersikap pasif menunggu lewatnya batas waktu evaluasi Rancangan APBDesa oleh Bupati/Walikota. 2) Tidak dijelaskannya lagi langkah yang harus diambil oleh Kepala Desa bersama BPD setelah melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi rancangan APBDesa yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan aturan ini berarti Kepala Desa langsung dapat menetapkan rancangan APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Sidosari pada hari ke - 21 evaluasi rancangan APBDesa. Namun hal ini tidak dilakukan karena faktor ketidaktahuan tentang jangka waktu evaluasi RAPBDesa oleh Bupati/Walikota.

Kata Kunci: *Desa, APBDesa, Desa Sidosari.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan pemerintahan desa merupakan salah satu bagian utama keseluruhan usaha pembangunan masyarakat. Pemerintahan Desa merupakan suatu wilayah Pemerintahan terendah langsung di bawah kecamatan, menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat desa serta dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu adanya peraturan mengenai anggaran Pendapatan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa menyatakan:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa,

2. Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Kedudukan, tugas dan fungsi Aparatur Pemerintahan Desa sesungguhnya menjadi penentu untuk keberhasilan pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu yang dibutuhkan tidak hanya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa itu sendiri tetapi juga dibutuhkan sistem pengaturan keuangan desa yang diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Era reformasi dan Otonomi Daerah yang diprogramkan oleh pemerintah Republik Indonesia guna memperlancar dan proses pembangunan maka dititik beratkan pada daerah yang berbasis pedesaan. Secara umum Alokasi Dana Desa

(ADD) atau yang di beberapa daerah dikenal juga dengan istilah Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa menunjukkan manfaat pada efektifitas dan efisiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang berskala Daerah secara tidak langsung. Secara umum ADD dapat diterima dan dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat desa. Dana tersebut meskipun jumlahnya masih terbatas namun diharapkan mampu menjadi stimulant bagi pembangunan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena dipengaruhi dengan meningkatnya baik penerimaan maupun pengeluaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mempunyai fungsi yang strategis karena merupakan alat penggerak keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan suatu pengaturan tentang keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembangunan desa. Oleh karena itulah maka APBDesa harus disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan melihat skala prioritas dan dalam pelaksanaannya harus terarah pada sasaran dengan cara yang berdaya dan berhasil guna.

Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik meskipun di tunjang adanya perencanaan yang baik, pengawasan yang baik partisipasi masyarakat yang baik apabila tidak diimbangi dengan tersediannya dana yang memadai serta pengelolaan dana yang baik pula.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul "Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Pengaturan tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?
- b. Bagaimanakah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji aspek-aspek

hukum yang berkaitan dengan penetapan APBDesa. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji kenyataan yang berkaitan dengan penetapan APBDesa di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sumber data diperoleh secara primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun pengolahan data dilakukan dengan cara klasifikasi data dan editing data, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan secara sistematis untuk disimpulkan secara induktif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Normatif Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengaturan mengenai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam proses penyusunan Rancangan APBDesa terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) antara lain:

- a. RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
- b. Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- c. RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- d. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- e. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Uraian tersebut dimaksudkan merupakan indikator dan atau sasaran kinerja Pemerintah Desa yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja Desa. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan

secara berkesinambungan. Standard analisa kerja adalah penilaian kewajiban atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai untuk setiap unit biaya yang berlaku bagi masing-masing desa. Berdasarkan arah dan kebijakan umum, Pemerintah Desa menyusun strategi dan prioritas tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan desa pemerintah menyiapkan rancangan APBDesa.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Penetapan Rancangan APBDesa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa;
- Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

- Penyampaian rancangan Peraturan Desa, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.
- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/ Kota ditetapkan.
- Pada Pasal di atas disebutkan bahwa ada proses evaluasi dari Bupati/Walikota terhadap Perdes Rancangan APBDesa. Proses evaluasi ini diatur didalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk ringkasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 1.

Proses Penetapan Rancangan APBDesa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Substansi penetapan Rancangan APBDesa menjadi APBDesa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyisakan beberapa hal yang masih perlu dibenahi, yaitu: 1) Tidak dijelaskannya hasil evaluasi Bupati/Walikota yang menyetujui Rancangan APBDesa. Sehingga yang terkesan didalam substansi pasal 7 tersebut adalah Kepala Desa hanya bersikap pasif menunggu lewatnya batas waktu evaluasi Rancangan APBDesa oleh Bupati/Walikota. 2) Tidak dijelaskannya lagi langkah yang harus diambil oleh Kepala Desa bersama BPD setelah melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi rancangan APBDesa yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Pada pasal 7 itu hanya disebutkan jangka waktu untuk merevisi rancangan APBDesa yaitu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Kedua hal inilah yang menurut peneliti harus dibenahi demi tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam proses penetapan rancangan APBDesa menjadi APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dengan mendasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Penetapan Rancangan APBDesa menjadi APBDesa juga diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Desa setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ini merupakan peraturan pelaksana dari aturan hukum yang lebih tinggi yang mengatur mengenai hal yang serupa, dalam hal ini adalah peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Hubungan antara keduanya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 2.

Korelasi antara PP No. 37/07 dengan Perda Kab Lamsel No. 10/06
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pengelolaan Keuangan Desa

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan hasil wawancara pada dari Selasa tanggal 12 Mei 2009 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak M. Amin Ansor selaku Kepala Desa Sidosari, dapat diketahui bahwa mekanisme Penetapan Rancangan APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Sidosari melalui beberapa tahapan yaitu:

- Untuk menyusun rancangan APBDesa diadakan pertemuan di Balai Desa Sidosari antara Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dan menyusun rancangan APBDesa agar selanjutnya dapat diajukan kepada BPD. Waktu yang digunakan untuk membahas rancangan APBDesa dalam pertemuan ini adalah 1 (satu) hari.
- Rancangan APBDesa yang telah dibahas kemudian diajukan dan dibahas kembali bersama antara Kepala Desa dan Badan

Permasyarakatan Desa Sidosari. Pembahasan ini juga dilakukan di balai desa dan dihadiri pula oleh perangkat desa yang lain (Kepala Dusun). Pembahasan rancangan APBDesa ini juga dilakukan dalam 1 (satu) hari.

- Setelah disetujui bersama antara Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa Sidosari, maka rancangan APBDesa disampaikan ke Bupati Lampung Selatan untuk proses evaluasi.
- Proses evaluasi yang dilakukan oleh Bupati memakan waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan. Pada waktu proses evaluasi dilakukan, Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sidosari hanya menunggu sampai rancangan APBDesa selesai dievaluasi dan dikembalikan kepada mereka untuk ditetapkan dalam peraturan desa.
- Untuk tahun 2009 ini rancangan APBDesa Sidosari sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Sidosari nomor 01 Tahun 2009 yang ditetapkan bulan Januari 2009.

Bagan 3.
Proses Penetapan Rancangan APBDesa Sidosari

Dengan merujuk pada hasil wawancara diatas dapat dilihat terdapat perihal yang tidak sesuai dengan pengaturan penetapan APBDesa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman aparat Desa, diantaranya sikap menunggu hasil evaluasi rancangan APBDesa dari Bupati hingga 3-4 Bulan padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 evaluasi terhadap rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari. Berdasarkan aturan ini berarti Kepala Desa langsung dapat menetapkan rancangan APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Sidosari pada hari ke-21 evaluasi rancanganAPBDesa. Namun hal ini tidak dilakukan karena faktor ketidaktahuan tentang jangka waktu evaluasi RAPBDesa oleh Bupati/Walikota.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sbb:

- a. Pengaturan tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara normatif didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, Substansi penetapan Rancangan APBDesa menjadi APBDesa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyisakan beberapa hal yang masih perlu dibenahi, yaitu: 1) Tidak dijelaskannya hasil evaluasi Bupati/Walikota yang menyetujui Rancangan APBDesa. Sehingga yang terkesan didalam substansi pasal 7 tersebut adalah Kepala Desa hanya bersikap pasif menunggu lewatnya batas waktu evaluasi Rancangan APBDesa oleh Bupati/Walikota. 2) Tidak dijelaskannya lagi langkah yang harus diambil oleh Kepala Desa bersama BPD setelah melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi rancangan APBDesa yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Pada pasal 7 itu hanya disebutkan jangka waktu untuk merevisi rancangan APBDesa yaitu paling lama 7

(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- b. Penetapan APBDesa Sidosari tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, terutama mengenai jangka waktu penetapan. Hal ini terjadi karena penetapan rancangan APBDesa menunggu hasil evaluasi dari Bupati hingga 3-4 Bulan padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 evaluasi terhadap rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari. Berdasarkan aturan ini berarti Kepala Desa langsung dapat menetapkan rancangan APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Sidosari pada hari ke-21 evaluasi rancanganAPBDesa. Namun hal ini tidak dilakukan karena faktor ketidaktahuan tentang jangka waktu evaluasi RAPBDesa oleh Bupati/Walikota.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Dati, Rinto, dan Wahyu., 2002. *Memahami Anggaran Publik*. IDEA Pres. Yogyakarta.
- Badrudin, Rudy. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. 2006 www.stieykpn.ac.id. diakses 22 April 2008.
- Kansil, C.S.T. 1988. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Munandar. *Kas*. Posted by www.dahlanforum diakses 22 April 2008.
- Surianingrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Aksara Baru. Jakarta.
- Soejono, Abdurrahman. 2003. *Metodelogi Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Wasistiono, Sadu, dan Tahir, M. Irwan., 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia. Bandung.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi*. 2004. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Tim Peneliti. *policy paper RUU Desa*.
www.forumdesa.org. diakses 12 Mei 2009.

Widjaja, A.W. 1996. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.